20

NASIONALISME RELIJIUS SEBAGAI STRATEGI DAKWAH STRUKTURAL

Bambang Subandi

Prodi Manajemen Dakwah, UIN Sunan Ampel Surabaya

bangbandi@uinsby.ac.id

Abstract: Structural Da'wa is characterized by strengthening the da'wa message on the power structure. Religious nationalism is a form of structural Da'wa strategy appropriate for plural societies such as the Indonesian people. It emerged from resistance to colonization. In Indonesia, religious nationalism played a role in the formation of a constitution that formulated "a Godhead" as the basis of the State. The 1945 Constitution develops legal products that do not conflict with the message of Islamic da'wa. Another role of religious nationalism is a network of tolerance based on justice by placing State sovereignty above religious sovereignty.

Keywords: Religious nationalism, structural da'wa, legal justice.

Abstract: Dakwah struktural ditandai dengan penguatan pesan dakwah pada struktur kekuasaan. Nasionalisme religius merupakan bentuk strategi dakwah struktural yang tepat bagi masyarakat plural semacam bangsa Indonesia. Ia muncul dari perlawanan terhadap kolonialisasi. Di Indonesia, nasionalisme religius berperan dalam pembentukan konstitusi yang merumuskan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar Negara. Konstitusi UUD 1945 mengembangkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan pesan dakwah Islam. Peran nasionalisme religius lainnya adalah jalinan toleransi yang berbasis keadilan dengan peletakan kedaulatan Negara di atas kedaulatan agama.

Kata Kunci: Nasionalisme religius, dakwah struktural, keadilan hukum.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdaulat sekaligus bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia menganut salah satu dari beberapa agama yang diakui oleh Negara. Masing-masing agama ini berusaha untuk mempertahankan pemeluknya serta menerima konversi agama dari pemeluk agama lain. Karakteristik keagamaan ini sangat rentan dengan konflik perpecahan. Masing-masing berusaha untuk melakukan dominasi dan hegemoni. Tentu saja, hal ini memunculkan kelompok yang kalah dan menang, mayoritas dan minoritas, serta kuat dan lemah. Gejolak konflik akan muncul pada perebutan sumber produksi ekonomi maupun sumber kekuasaan politik. Konflik ini dapat diredam melalui kedaulatan Negara.

Kedaulatan Negara didasarkan dan diperkuat oleh nasionalisme serta dijalankan melalui penegakan hukum. Nasionalisme yang tumbuh akibat kolonialisasi mengalami dinamika setelah kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme dihadapkan pada primordialisme. Perikat nasionalisme bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sementara itu, penegakan hukum ditentukan oleh eksistensi dan implementasi konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Melalui Pancasila, kebhinekaan dan kemajemukan bangsa Indonesia dapat berjalan harmoni penuh toleransi. Karena itu, Pancasila adalah falsafah hidup dan identitas bangsa Indonesia. Begitu pula, keadilan hukum yang berpijak pada konstitusi akan memberikan pengaruh pada keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan budaya, dan keadilan beragama.

Dari sisi pesan, tidak satu pun sila dalam Pancasila serta pasal-pasal dalam UUD 1945 bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Proses perumusannya juga sesuai dengan strategi dakwah struktural, yakni pengutamakan musyawarah mufakat. Implementasinya membuahakan kehidupan berbangsa dan beragama yang religius. Implementasi ini diwadahi dalam institusi negara-bangsa (*nation-state*). Hingga saat ini, kegiatan dakwah Islam dan penerapan ajaran Islam dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja, persoalan keagamaan muncul bukan dari rumusan perundang-undangan yang berlaku, melainkan pada penegakan hukum yang berbasis toleransi.

Tulisan ini akan menawarkan toleransi yang berbasis keadilan yang dibangun melalui strategi nasionalisme religius. Dalam hal ini, doktrin yang dimunculkan adalah Negara di atas suatu bangsa, nasionalisme religius sebagai gerakan dakwah struktural, hukum sebagai panglima, dan UUD 1945 dijabarkan dalam berbagai produk hukum. Namun demikian, konsep negara dan bangsa perlu dikemukakan lebih dahulu.

B. Negara dan Bangsa: Institusi Dakwah Struktural

Pemikiran suatu negara modern didasarkan pada Trias Politika Montesquieu yang membagi kekuasaan Negara dalam tiga wilayah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara ideal, legislatif membuat kebijakan melalui musyawarah mufakat, eksekutif menjalankan kebijakan tersebut, dan yudikatif mengawasi jalannya kebijakan. Ketiga kekuasaan negara-bangsa ini merupakan struktur utama yang dijadikan wilayah dakwah struktural. Target gerakannya adalah penempatan kader dakwah untuk menduduki jabatan-jabatan di ketiga kekuasaan di atas. Hal ini diasumsikan, bahwa kegiatan dakwah struktural tergantung pada kader dakwah. Sementara itu, dakwah kultural menekankan pada pesan dakwah, bukan pendakwah.

Kelemahan dari Trias Politica terletak pada sistem kontrol. Demikian ini menjadi persoalan tata negara di Indonesia akibat pengaruh liberalisasi di semua bidang, termasuk konstitusi. Presiden tidak lagi memberikan laporan tanggung jawab di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan konskuensi penerimaan dan penolakan, melainkan Presiden hanya melaporkan hasil kebijakan yang dibuat sendiri, bukan oleh legislatif. Kekuasaan legislatif juga sulit dikontrol oleh rakyat, karena suara rakyat telah tergadaikan.⁴⁹³ Sementara itu, kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi tidak terkontrol secara efektif, meskipun Komisi Yudisial dibentuk.

Sistem kontrol sosial merupakan basis bagi keadilan. Kelemahan penegakan keadilan bagi institusi Negara bisa dinilai sebagai awal turunnnya kepercayaan rakyat kepada Negara. Kepercayaan ini terwujud dalam kontrak sosial. Sebuah Negara terbentuk melalui kontrak sosial. Tentu saja, tidak semua rakyat terlibat dalam kontrak, melainkan melalui sistem keterwakilan. Sistem ini relevan dengan bangsa yang majemuk dan plural. Sistem pemilihan relevan dengan bangsa yang homogen. Negara yang dibentuk di awal akan melahirkan bangsa yang homogen. Hal ini dapat dipelajari dari beberapa Negara dengan sistem monarki. Bagi bangsa yang majemuk,

⁴⁹³ Regulasi DPR menyatakan, para anggota yang absen dalam enam sidang berturut-turut dapat dipecat. Namun, beberapa anggota melewati sidang empat hingga lima kali berturut-turut dan muncul pada sidang berikutnya. Dengan begitu, sanksi tidak dapat dijatuhkan. Lihat Patawari, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat* (Makasar: Unhas, Press, 2017), 158.

Negara terbentuk melalui kontrak yang disepakati bersama. Republik Indonesia mengikuti pola kontrak sosial. Dalam politik Islam, kontrak sosial ini dinamakan sebagai *al-mu'ahadah*.

Dalam Al-Qur'an, konsep negara dan bangsa dikemukakan pada surat al-Hujurat ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. al-Hujurat: 13). Ayat ini memuat tujuh pemahaman. *Pertama*, ayat ini menyerukan kepada umat manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan hidup sesama manusia diatur dengan keadilan gender, yakni memperlakukan manusia sesuai dengan kodrat jenis kelaminnya. Keadilan ini akan mengarahkan pada peradaban manusia, sebagaimana sila kedua dari Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penciptaan laki-laki dan perempuan tidak ditujukan untuk diskriminasi, melainkan pada peranan yang sesuai dengan kodratnya. Naluri alami ini akan menentukan kondisi suatu bangsa. Sejarah telah mencatat, tidak sedikit bangsa hancur, karena moralitas hubungan laki-laki dan perempuan tidak diindahkan.

Kedua, bangsa dikenali melalui identitas masyarakatnya, sebagaimana dahan atau ranting (*al-sya'b*) yang menunjukkan jenis suatu pohon. Identitas suatu bangsa terwujud dalam budaya yang dikembangkan, seperti cara hidup dan falsafah hidup. Dari budaya ini, suatu bangsa memiliki peradaban yang berbeda dengan bangsa yang lain. Jadi, pembangunan materi ditentukan oleh pembangunan immateri.

Ketiga, negara terbentuk sesuai dengan penerimaan dan kesepakatan atas suatu perjanjian. Kata *qabail* berakar dari kata *qabul* yang berarti penerimaan. Dahulu, para kabilah terbentuk karena adanya kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan. Ketika kesepakatan ini dilanggar, maka kabilah ini akan terpecah, bahkan musnah karena peperangan. Perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindarkan dengan keadilan social melalui penegakan hukum, sebagaimana pesan sila kelima dari Pancasila.

Keempat, pakar tafsir menyatakan, bahwa bangsa terdiri dari beberapa kabilah.⁴⁹⁴ Pakar tafsir yang lain menyatakan kebalikannya. Dengan demikian, hirarkhi kelompok sosial diakui. Masing-masing kelompok kecil mengirimkan wakilnya untuk suatu kelompok besar dalam pengambilan keputusan melalui mufakat. Keterwakilan ini sesuai dengan sila keempat dari Pancasila.

Kelima, aneka ragam bangsa dan negara ditujukan untuk menjalin kerja sama yang didasarkan pada saling memahami dan mengenal satu sama lain. *Ta'aruf* tidak berarti menyatukan, melainkan mempersatukan, seperti sila ketiga dari Pancasila: Persatuan Indonesia. Karena itu, pluralitas merupakan keniscayaan dan alami. Melalui kerja sama antar kelompok ini, distribusi pekerjaan dan pembagian kerja dapat terwujud. Dengan demikian, individu manusia harus masuk dalam suatu kelompok tertentu dan bergerak sesuai dengan arahan kelompoknya.

Keenam, kualitas potensi individu manusia terletak pada keimanan. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin besar kualitas potensinya, dan semakin besar pula tingkat kepercayaan kepadanya. Tingkat keimanan ini diukur pada kedekatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama dari Pancasila. Kata *atqakum* (yang paling takwa dari kalian) menunjukkan ketakutan kepada Tuhan Yang Esa. Ketakutan takwa berarti makin mendekat, sedangkan ketakutan manusiawi berarti semakin menjauh.

Ketujuh, ayat ini diakhiri dengan nama Allah Yang Maha Mengetahui pada hal-hal yang tampak (*al-'alim*) dan Allah Yang Maha Mengetahui hal-hal yang tersembunyi (*al-khabir*). Artinya, kadar keimanan dan ketakwaan sulit diketahui kecuali oleh Allah.⁴⁹⁵ Demikian pula, upaya saling mengenal dalam kerja sama antar kelompok manusia melahirkan banyak manfaat dan hikmah yang hanya diketahui oleh manusia melalui ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah.

⁴⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 615-618.

⁴⁹⁵ *Ibid*.

Kontrak sosial dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tampak dalam teks Proklamasi: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Pemindahan kekuasaan ini tidak saja diartikan sebagai dari kekuasaan kolonial ke pribumi, melainkan pula dari kekuasaan dari beberapa kerajaan, etnis, maupun suku ke pemerintah Republik Indonesia. Begitu pula, kesepakatan dalam kontrak sosial diwujudkan dalam bentuk konsep dasar secara tertulis.

Sehari setelah pelaksanaan proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang pertama dan berhasil mengambil keputusan: (1) Mengesahkan Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan kontitusi yang mengandung landasan idealisme. (2) Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. (3) Membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan hasil: (1) Membagi wilayah Indonesia menjadi delapan propinsi. (2) Merancang pembentukan dua belas departemen dan menunjuk para menteri-menterinya. (3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu presiden.⁴⁹⁶

Proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas merupakan bentuk strategi dakwah kultural. Umat Islam Indonesia yang diwakili oleh para tokohnya berdiskusi dengan para tokoh non-muslim untuk merumuskan konstitusi sebagai bentuk perjanjian. Tauhid sebagai pesan utama dakwah Islam berhasil dirumuskan dalam sila pertama dalam Pancasila maupun pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dengan klausul: Ketuhanan Yang Maha Esa. Pesan Tauhid ini sekaligus menjadi dasar Negara. Karena itu, sistem kenegaraan tidak boleh bertentangan dengan dasar Negara tersebut.

Setelah konstitusi dirumuskan dan pemerintahan terbentuk, pemerintah pertama melakukan lobi-lobi kepada pemegang kekuasaan bangsa Indonesia, antara lain: para raja, kepala suku dan etnis, dan pemuka agama. Pengakuan dunia internasional juga penting dalam menentukan wilayah teritorial Negara. Ketentuan wilayah teritorial berimplikasi pada status warga negara. Oleh karena itu, pemisahan wilayah teritorial berdampak pada kedaulatan NKRI. Sebagaiantisipasi pemisahan ini, gerakan nasionalisme harus diutamakan atas gerakan primordialisme.

C. Nasionalisme Religijs sebagai Strategi Dakwah Struktural

Asal usul nasionalisme dan relijiusitas menjadi perdebatan. Kelompok parenialis semacam Armstrong, Gillingham, Hastings, Hutchinson, O'Brien, dan Tomka menyatakan, bahwa kebangsaan muncul lebih dahulu sebelum adanya nasionalisme. Bangsa ini menganut suatu kepercayaan atau agama. Kebangkitan nasionalisme agama dimulai dari reformasi Protestan. Kelompok modernis, semacam Grzymala-Busse, Porter-Szucs, dan Zubrzycki, memandang nasionalisme sebagai produk modernitas. Ide dan identitas keagamaan tidak sesuai dengan nasionalisme. Ketika nasionalisme dan relijiusitas bisa disatukan, maka hal ini dianggap sebagai penemuan baru.⁴⁹⁷

Hubungan antara nasionalisme dan relijiusitas bersifat saling mempengaruhi. Dalam beberapa konteks, nasionalisme dapat memperkuat relijiusitas. Menurut Calhoun, nasionalisme memiliki tiga dimensi, yaitu diskursus, proyek, dan evaluasi. Diskursus menunjuk pada produksi pemahaman kultural yang diarahkan untuk menggunakan gagasan tentang negara sebagai kerangka untuk memahami dunia. Proyek nasionalisme berkaitan dengan gerakan sosial atau kebijakan publik untuk memperkenalkan sebuah kepentingan bersama yang disebut dengan negara. Evaluasi menghasilkan ideologi politik dan budaya yang membangun superioritas suatu

⁴⁹⁶ Heri Rohayuningsih, "Peranan BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia", *Forum Ilmu Sosial* (Vol. 36, No. 2, 2009), 184-194.

⁴⁹⁷ Anna Grzymala-Busse, "Religious Nationalism and Religious Influence", *Oxford Research Encyclopedia of Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

negara.⁴⁹⁸ Rasa kebanggaan dan identitas nasional membuat praktik dan kepercayaan agama lebih menarik. Selama perang di Kroasia, praktik dan kepercayaan keagamaan meningkat, dan ia menurun setelah berakhirnya konflik.⁴⁹⁹ Studi ini menyimpulkan, bahwa relijiusitas memberikan peran dan pengaruh selama negara dalam kondisi peperangan. Di masa perdamaian, peranan dan pengaruh agama menurun.

Di sisi lain, relijiusitas memiliki identitas yang kuat untuk menopang identitas nasionalisme. Banyak tokoh nasionalis yang menggunakan terminologi agama untuk memperkuat identitas politiknya⁵⁰⁰ Penggunaan ini untuk mempersatukan identitas etnis yang beraneka ragam dalam identitas yang kuat, yaitu agama.⁵⁰¹ Nasionalisme relijius tumbuh pada negara-negara yang merdeka dari penjajahan (*post-colonialist*) serta negara-negara setelah terbelenggu oleh sistem komunis (*post-communist*). Nasionalisme relijius tumbuh subur di negara-negara bekas Uni Sovyet. Hasil penelitian Voicu menunjukkan, bahwa ideologi nasionalisme di Eropah berpengaruh positif pada negara-negara dengan konsentrasi agama yang tinggi. Dalam negara-negara bekas komunisme, pengaruh tersebut bernilai negatif.⁵⁰²

Di negara-negara modern, agama yang tumbuh di masyarakat dinasionalkan (*nationalizing religion*). Sejarah konflik antar pemeluk agama direduksi sekaligus dikompilasi dalam bentuk persatuan nasional. Perayaan hari raya agama dijadikan perayaan nasional. Upaya nasionalisasi agama ini termasuk gerakan desekularisasi. Tesis sekularisasi memiliki tiga proposisi, yaitu penurunan kepercayaan agama, privatisasi agama, dan pembebasan dari agama. Peran sekuler dalam kaitannya dengan agama tidak hanya membatasi, karena tradisi keagamaan yang ditafsirkan secara nasionalis sangat penting dalam pembentukan hubungan, antara negara dan masyarakat maupun masyarakat dan individu, di negara modern.⁵⁰³

Nasionalisme relijius menjadi kekuatan dalam menopang sikap relijiusitas, memberdayakan organisasi-organisasi keagamaan untuk mempengaruhi kebijakan publik di berbagai bidang, serta membentuk pola-pola kekerasan antar dan dalam negara. Nasionalisme relijius bergantung pada identitas dan mitos agama untuk mendefinisikan bangsa dan tujuannya.⁵⁰⁴ Dalam hal ini, agama dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Relijiusitas keagamaan memiliki daya emosi yang lebih tinggi, karena agama bersifat sakral dan negara bernilai profan. Dari beberapa teori hubungan keagamaan dan kenegaraan di atas, nasionalisme relijius dapat didefinisikan sebagai "pemanfaatan agama untuk kepentingan negara".

Kebalikan dari nasionalisme relijius adalah pemanfaatan negara untuk kepentingan agama. Ia dapat diistilahkan dengan relijiusitas nasionalis. Dalam hal ini, negara dijadikan alat untuk tujuan agama. Kondisi ini tidak relevan untuk satu negara dengan banyak agama, sebagaimana sistem negara-bangsa saat ini. Ia relevan pada dominasi satu agama yang menguasai berbagai wilayah. Di masa kekhalifahan Islam, beberapa kawasan yang ditaklukkan mengikuti hukum Islam yang diberlakukan oleh pemerintah. Begitu pula, negara Vatikan memanfaatkan negara untuk kepentingan agama Katolik.

⁴⁹⁸ Craig Calhoun, *Nationalism* (Buckingham: Open University Press, 1997), 29.

⁴⁹⁹ Dusko Sekulic, Garth Massey, and Randy Hodson, "Ethnic Intolerance and Ethnic Conflict in the Dissolution of Yugoslavia", *Ethnic and Racial Studies* (Vol. 29, Nomor 5, Tahun 2006), 797-827.

⁵⁰⁰ Anthony D. Smith, "The Sacred Dimension of Nationalism", *Millenium-Journal of International Studies* (Vol. 29, Tahun 2000), 791-814.

⁵⁰¹ Claire Mitchell, "The Religious Content of Ethnic Identities", *Sociology* (Vol. 40, Nomor 6, Tahun 2006), 1135-1152.

⁵⁰² Malina Voicu, "Effect of Nationalism on Religiosity in 30 European Countries", *European Sociological Review* (Vol. 28, Nomor 3, Tahun 2012), 333-343.

⁵⁰³ Peter van der Veer, "Nationalism and Religion", John Breuilly (Ed.) *The Oxford Handbook of the History of Nationalism* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 657.

⁵⁰⁴ Anna Grzymala-Busse, "Religious Nationalism and Religious Influence", *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.

Gerakan nasionalisme terformulasi dalam beberapa bentuk. Di kawasan negara-negara Arab, nasionalisme diwujudkan dalam konsep nasionalisme Arab. Konsep sering digunakan untuk memperkuat gerakan perlawanan terhadap Israel. Begitu pula, Jepang memperkenalkan gerakan Asia Raya sebagai implementasi dari konsep nasionalisme Asia. Di penghujung abad 20, nasionalisme menjadi kekuatan setiap negara maju maupun berkembang. Hal ini tidak terlepas dari konsep negara bangsa yang dibatasi oleh wilayah teritorial dan kedaulatan negara. Masing-masing negara memerlukan nasionalisme ketika hubungan diplomatik dilakukan. Karena itu, konsep nasionalisme mengalami pergeseran dari anti kolonialisme ke identitas negara.

Di Indonesia, nasionalisme berkembang dalam lima tahapan. Tahapan pertama adalah nasionalisme kultural yang ditandai dengan pendirian organisasi-organisasi kemasyarakatan, baik berorientasi ekonomi, keagamaan, sosial, pendidikan, maupun kebudayaan. Hobsbawn menyebutnya sebagai proto-nasionalisme.⁵⁰⁵ Di bidang pendidikan, pesantren menjadi kompetitor lembaga pendidikan yang didirikan kolonial Belanda. Karena itu, spirit nasionalisme ditanamkan dalam pesantren, sehingga beberapa organisasi didirikan oleh para alumni pesantren. Serikat Dagang Islam didirikan oleh H. Samanhudi di Pekalongan sebagai upaya kemandirian ekonomi kaum pribumi. Serikat Islam didirikan oleh H.O.S. Cokroaminoto untuk menanamkan kesadaran umat Islam di bidang sosial-politik. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama didirikan untuk memperkuat basis kultural keagamaan. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan dengan sistem modern yang didirikan Ki Hajar Dewantara.

Tahapan kedua adalah nasionalisme struktural. Tahapan ini dimulai dari pendudukan Jepang atas Indonesia yang memberikan peluang untuk mengusir kolonialisme Barat. Dalam penjajahan Jepang, bangsa Indonesia diberikan peluang untuk membuat struktur nasional, seperti pembentukan angkatan bersenjata (PETA) dan birokrasi keagamaan (Shumubu). Tahapan nasionalisme struktural ini dilanjutkan dalam sidang BPUPKI. Wujud dari nasionalisme struktural adalah terbentuknya konstitusi, pemerintahan awal Republik Indonesia, pemindahan kekuasaan, penentuan batas teritorial negara dan ibukotanya, serta penyelenggaraan pemilihan umum.

Tahapan ketiga adalah nasionalisme radikal yang ditandai dengan nasionalisasi kepemilikan negara dan politik kerakyatan. Tahapan ini berlangsung selama akhir periode Orde Lama dalam kepemimpinan Presiden Soekarno. Nasionalisme radikal memiliki orientasi politik yang sama dengan sosialisme-komunisme. Dalam hal ini, negara menguasai rakyat tanpa intervensi asing yang disebut Soekarno sebagai Neo Kolonialisme-Imperialisme (Nekolim). Kekuasaan Negara ini disimbolkan pada kekuasaan Presiden. Karena itu, Presiden Soekarno dalam tahapan nasionalisme radikal diberikan label: Pemimpin Besar Revolusi. Para pendukungnya mendorong untuk dijadikannya sebagai Presiden seumur hidup.

Tahapan keempat adalah nasionalisme liberal yang ditandai oleh masuknya negara asing dalam suatu negara. Masa Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto mengundang investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA). Produk negara asing membanjiri konsumen dalam negeri, meskipun beberapa regulasi dikeluarkan untuk memberikan proteksi. Nasionalisme liberal ini merupakan dampak globalisasi yang meruntuhkan aliran nasionalisme. Menurut Fukuyama, globalisasi merubah nasionalisme politik menjadi nasionalisme kultural.⁵⁰⁶ Untuk menahan arus globalisasi ini, Presiden Soeharto menerapkan doktrin Pancasila secara murni dan konsekuen kepada rakyat Indonesia melalui pembentukan BP7, penataran P-4, dan sebagainya. Tahapan ini tetap berjalan hingga masa reformasi dengan penurunan kadar doktrin Pancasila. Akibatnya, nasionalisme liberal berjalan dalam intervensi negara asing.

Tahapan kelima adalah nasionalisme moral yang dimunculkan untuk menahan dekadensi moral sebagai akibat dari liberalisasi nasionalisme. Dekadensi moral bangsa yang utama adalah krisis kepercayaan dari rakyat kepada penyelenggara negara. Krisis kepercayaan ini berdampak

⁵⁰⁵ E.J. Hobsbawn, *Nasionalisme Menjelang Abad 21* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 57-93.

⁵⁰⁶ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: The Free Press, 1992), 266.

secara luas serta memiliki akar masalah yang beragam. Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, Presiden SBY menawarkan pemikiran nasionalisme religius sekaligus menggerakkan roda pemerintahannya ke arah tersebut. Meskipun demikian, nasionalisme religius berlawanan dengan nasionalisme sekuler yang meletakkan agama di luar area politik. Dalam hal ini, PDIP dengan ideologi nasionalisme sekuler⁵⁰⁷ menjadi oposisi bagi pemerintahan SBY.

Kompetisi antara nasionalis-sekuler dan nasionalis-religius sebagaimana diungkapkan oleh Marx Juergensmayer terus berlangsung di era globalisasi.⁵⁰⁸ Dalam perpolitikan Indonesia, nasionalis religius bermula dari nasionalis Islam.⁵⁰⁹ Pertarungan kedua kubu ini mengemuka pada sidang BPUPKI tahun 1945. Saat itu, Soekarno berpandangan, bahwa Pancasila merupakan hasil olah pikir dari budaya Indonesia. Pandangan ini ditolak oleh kubu nasionalis Islam yang menyatakan, bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran yang diambil dari Wahyu Tuhan. Muhammad Natsir dari Masyumi dan KH Ahmad Zaini dari NU mempertegas hal ini. Kenyataannya menunjukkan adanya kompromi politik antara kedua kubu, sehingga KH A Wahid Hasyim menyetujui rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Namun, kompromi ini kurang diterima oleh perwakilan non-muslim dari wilayah Indonesia Timur yang diwakili A.A. Maramis. Akhirnya, rumusan "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya" diganti dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan terakhir ini tercantum dalam Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.⁵¹⁰

Pergulatan antara nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler terus berlangsung hingga saat ini. Nasionalisme Islam mengambil bentuk penerapan syariat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI bersyariah. Oleh karena itu, label Islam memiliki konotasi politik yang ditakuti oleh beberapa elemen bangsa. Pendirian negara Islam di Indonesia selalu dikaitkan dengan nasionalisme Islam. Demikian ini berakibat pada bias makna nasionalisme Islam oleh politisi muslim dan politisi sekuler, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kesetiaan dan pengakuan kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Dalam institusi militer, terdapat kubu ABRI merah dan ABRI hijau. Dalam birokrasi pemerintahan, terdapat pemilahan pejabat santri dan priyayi. Masyarakat pun terbelah antara abangan dan putihan. Di kalangan para pengusaha, terdapat pemilahan yang kurang tepat, yaitu pengusaha pribumi dan nonpribumi. Pengusaha pribumi selalu dikonotasikan sebagai pengusaha muslim dan pengusaha non pribumi dianggap sebagai pengusaha non-muslim.

Label Islam yang melekat pada institusi maupun gerakan sosial politik di Indonesia menunjukkan kebangkitan Islam melawan kekuatan di luar Islam. Hal ini melekat pada istilah politik Islam, ekonomi Islam, Hukum Islam, Universitas Islam, organisasi Islam dan sebagainya. Nasionalisme religius menghilangkan kata Islam untuk menghindari penyempitan makna pada agama tertentu. Secara teoretis, nasionalisme religius merupakan legitimasi politik suatu negara oleh persamaan agama. Nasionalisme Pakistan maupun Turki modern saat ini terbentuk oleh umat Islam konservatif. Bentuk nasionalisme lainnya adalah nasionalisme kultural, sebagaimana nasionalisme China yang terbentuk oleh kultur Tionghoa. Sementara itu, nasionalisme Jerman terbentuk oleh persamaan etnis.⁵¹¹ Jadi, nasionalisme religius didasarkan pada satu agama.

⁵⁰⁷ Dalam pasal 5 AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai ini berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Jati dirinya adalah Kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Watak partainya adalah gotong royong, merdeka, pantang menyerah, dan progressif revolusioner.

⁵⁰⁸ Marx Juergensmayer, *Nasionalis Sekuler VS Nasionalis Religius* (Bandung: Mizan, 1998).

⁵⁰⁹ L. Andriani Purwastuti, "Pendidikan Politik Nasionalis-Religius: Suatu Strategi Memperkokoh Kebhinekatunggalikaan Indonesia", *Fondasia* (Vol. II, Nomor 10, Tahun 2010), 28-42.

⁵¹⁰ Azyumardi Azra, *Japan, Indonesia, Islam, and the Moslem World* (Jakarta: The Japan Foundation, 2006), 46.

⁵¹¹ Nunu Burhanuddin, "Konstruksi Nasionalisme Religius: Relasi Cinta dan Harga Diri dalam Karya Sastra Hamka", *Jurnal Episteme* (Vol. X, Nomor 2, Tahun 2015), 353-384.

Strategi dakwah nasionalisme religius memperhatikan pluralitas agama di Indonesia. Masing-masing agama ini memiliki perbedaan yang tajam sekaligus pertemuan dalam simpul persamaan. Di antara titik pertemuan agama-agama adalah spiritualitas dan moralitas. Salah satu gerakan dakwah nasionalisme religius yang menerapkan spiritualitas dan moralitas adalah penanaman pendidikan karakter (*character building*) dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi.⁵¹² Di bidang pemerintahan, nasionalisme religius membuat kebijakan yang terukur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Demikian pula, deradikalisasi dibangun untuk meredam kejahatan terorisme yang mengatasnamakan agama. Relijiusitas keagamaan melihat pada kesadaran beragama yang termanifestasikan dalam pergaulan sehari-hari. Pandangan ini berasumsi, bahwa keimanan yang mendalam, dan kokoh akan menghasilkan perilaku yang terpuji. Nasionalisme religius justru menciptakan pola pergaulan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh keimanan yang kokoh dari setiap pemeluk agama.

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nasionalis religius memadukan kebangsaan dan ketuhanan untuk Indonesia maju.⁵¹³ Kebangsaan dan ketuhanan adalah dua kata sifat yang dilekatkan pada satu ruang, yaitu Indonesia. Bagi SBY, pandangan kebangsaan yang berdasarkan ketuhanan merupakan strategi untuk kemajuan negara Indonesia. Pandangan ini relevan dengan kondisi bangsa Indonesia secara sosiologis dan antropologis yang diartikulasikan dalam UUD 1945. Pemikiran ini memiliki basis yang sama dengan tokoh nasionalis Indonesia lainnya. Nasionalisme Soekarno bersifat sekuler.⁵¹⁴ Nasionalisme KH Ahmad Dahlan diproyeksikan untuk menghilangkan dikotomi santri dan non santri. Nasionalisme KH Hasyim Asy'ari melahirkan sumber daya yang agamis dengan merawat budaya lokal.⁵¹⁵ SBY mengemukakan,

“For an exceedingly diverse country like Indonesia, that means not just promoting multiparty democracy but also building a multiethnic democracy, and one that guarantees freedom of religion for all. We in Indonesia have shown that Islam, democracy, and modernity can grow together. We are a living example that there is no conflict between a Muslim's spiritual obligation to Allah, his civic responsibility as a citizen in a pluralist society, and his capacity to succeed in the modern world”.⁵¹⁶

Nasionalisme religius menolak perlawanan nasionalisme dan agama, sebagaimana pemikiran Muhammad Naqvi dan Abu al-A'la al-Maududi. Perlawanan dua hal tersebut akan membentuk nasionalisme agama yang mengakomodasi agama tertentu dalam bingkai nasionalisme, seperti Republik Islam Iran. Ia juga menolak pemisahan antara nasionalisme dan agama yang membentuk negara sekuler, sebagaimana penerapan nasionalisme di negara-negara Barat. Oleh karena itu, Indonesia bukan merupakan negara agama maupun negara sekuler, melainkan negara yang beragama. Kebangsaan sebagai bentuk nasionalisme tercermin dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yaitu “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sementara itu, ketuhanan sebagai wujud religiusitas dinyatakan sebagai dasar negara, sebagaimana dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, nasionalisme religius menetapkan ajaran agama sebagai dasar kedaulatan rakyat.

⁵¹² Nanang Faisol Hadi, “Mendesain Bangsa Yang Religius dan Nasionalis dari Bangku Sekolah”, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Tazkir* (Vol. IV, Nomor 1 Tahun 2018), 41-70.

⁵¹³ Pernyataan SBY dalam twitter @SBYudhoyono tanggal 13 November 2018 pukul 21.25 WIB.

⁵¹⁴ Winner Silaban, “Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme”, *Jurnal Dinamika Politik* (Vol. I, Nomor 3. Tahun 2012), 1-6.

⁵¹⁵ Rofiq Nurhadi, “Pendidikan Nasionalisme Agamis dalam Pandangan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari”, *Jurnal Studi Islam Cakrawala* (Vol. XXII, Nomor 2 Tahun 2017), 121-131.

⁵¹⁶ Susilo Bambang Yudhoyono, “The Democratic Instinct in the 21st Century”, *Journal of Democracy* (Vol. 21, Nomor 3, Tahun 2010), 5-10.

Dakwah nasionalisme religius menjadikan agama sebagai alat untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Nasionalisme religius menolak kedaulatan agama atas kedaulatan rakyat. Dengan strategi ini, umat Islam di Indonesia bisa mengamalkan ajaran Islam dan menyelenggarakan aneka kegiatan dakwah di bawah payung hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antara umat beragama terjalin harmonis dan penuh dengan toleransi yang didasarkan pada keadilan hukum. Sebagai penganut aliran hukum Kontinental, sistem hukum di Indonesia bermuara pada teks peraturan perundang-undangan. Para penegak hukum hanya melaksanakan teks tersebut. Secara hirarkhi hukum, semua produk hukum tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. Produk hukum tertinggi adalah konstitusi UUD 1945 yang selaras dengan pesan dakwah Islam. Jadi, gerakan dakwah struktural dari nasionalisme religius terletak pada politik hukum dan penegakkan keadilan hukum.

D. Toleransi Berbasis Keadilan Ataupun Keadilan Berbasis Toleransi

Nasionalis-sekuler dan nasionalis-religius memiliki pendekatan yang berbeda tentang hubungan toleransi dan keadilan. Nasionalis-sekuler yang lebih memperhatikan aspek kearifan lokal (*local wisdom*) mengarah pada keadilan yang berbasis toleransi. Baginya, hukum tidak diberlakukan secara rigid, melainkan fleksibel. Sementara itu, nasionalis-religius justru melihat kepatuhan semua elemen masyarakat kepada hukum sebagai upaya stabilitas nasional. Kedua pola ini merupakan hasil perbandingan antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Kata keadilan dalam Pancasila disebutkan sebanyak dua kali. Keadilan yang pertama berada di sila kedua sebagai sifat dari kemanusiaan. Keadaan kedua terdapat dalam sila kelima sebagai keadilan sosial. Hal ini menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia memerlukan keadilan individu maupun kelompok. Keadilan ini tidak dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi, melainkan keadilan proporsional yang memberikan hak sesuai dengan kewajibannya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman, yaitu pemberian hak yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Komponen hak dan kewajiban dinyatakan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara. Dengan perhatian pada hak dan kewajiban, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara hukum. Secara umum, hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam konstitusi UUD 1945.⁵¹⁷ Semua produk hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, karena ia merupakan penjabaran dari konstitusi. Ketika produk hukum memuat klausul yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan menerima *judicial review* dari pemohon. Mahkamah Konstitusi hanya menunjukkan adanya pertentangan suatu pasal dengan konstitusi. Lembaga ini tidak berhak untuk merubah atau menggantikannya.

Hak dan kewajiban warga negara diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi keadilan hukum, penetapan kewajiban warga negara yang melalui legislasi harus memperoleh persetujuan dari wakil rakyat. Begitu pula, gugatan warga negara diatur melalui sistem peradilan. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia telah terbentuk dengan baik. Persoalan hukum terletak pada penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum dihadapkan pada budaya masyarakat yang berbasis toleransi serta kekuatan politik yang hegemonik. Jadi, kunci kedaulatan Negara terletak pada penegakan hukum. Keadilan dalam penegakan hukum akan berdampak pada stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, dan politik. Stabilitas ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan, budaya, dan agama.

Ketika politik dan sosial-budaya telah mempengaruhi penegakan hukum, maka keadilan berbasiskan toleransi. Keadilan membuahkan kepastian hukum dengan argumentasi yang obyektif. Toleransi didorong oleh kepentingan subyektif, sehingga ia melahirkan kebijakan yang

⁵¹⁷ Naya Amin Zaini, "Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia)", *Jurnal Panorama Hukum* (Vol. 1 No. 2, Tahun 2016), 1-16.

tidak pasti. Berbagai kekacauan suatu negara disebabkan ketidakpastian hukum. Kepentingan politik mengalahkan dan mempengaruhi keputusan hukum (jurisprudensi) dan penegakan hukum. Dalam hal ini, politik adalah panglima atas hukum. Pola ini akan menciptakan politik barter, karena politisi elit 'tersandera' oleh kasus hukum. Setiap politisi elit diikuti oleh sejumlah partisipan loyalis yang menciptakan isu dan dinamika politik di tanah air.

E. Penutup

Masyarakat modern yang dijalankan oleh sistem virtual memerlukan kepastian dan persamaan. Sistem virtual dikendalikan oleh teknologi informasi dengan akurasi yang tinggi. Kompetisi di semua lini berjalan sangat cepat dan masif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan, persamaan, dan kepastian akan membuat frustrasi masyarakat modern. Jika hal ini dibiarkan, maka masyarakat modern, terutama kaum milenial, tidak percaya kepada Negara. Mereka apatis dengan nasionalisme. Wilayah teritorial Negara telah lama roboh oleh globalisasi. Lambang Negara, bendera Negara, dan lagu kebangsaan dijadikan sebagai simbol ritual upacara. Pejabat pemerintah dianggap sebagai pelayan mereka yang dipandang tanpa penghormatan. Bukankah mereka menamakan dirinya sebagai Abdi Sipil Negara (ASN) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah tidak dijadikan sebagai media pemberian suara, melainkan transaksi politik.

Semua persoalan bangsa Indonesia bermuara pada keadilan hukum, baik pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum. Keadilan hukum ini akan tercapai melalui kepemimpinan yang benar, kuat, dan berani. Kepemimpinan ini hanya menjalankan produk hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Dari konstitusi ini, nasionalisme religius sebagai strategi dakwah struktural dijalankan.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *Japan, Indonesia, Islam, and the Moslem World*. Jakarta: The Japan Foundation, 2006.
- Burhanuddin, Nunu. "Konstruksi Nasionalisme Religius: Relasi Cinta dan Harga Diri dalam Karya Sastra Hamka". *Jurnal Episteme*. Vol. X, Nomor 2, Tahun 2015, 353-384.
- Calhoun, Craig. *Nationalism*. Buckingham: Open University Press, 1997.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: The Free Press, 1992.
- Grzymala-Busse, Anna. "Religious Nationalism and Religious Influence". *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Hadi, Nanang Faisol. "Mendesain Bangsa Yang Religius dan Nasionalis dari Bangku Sekolah". *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Tazkir*. Vol. IV, Nomor 1 Tahun 2018, 41-70.
- Hobsbawn, E.J. *Nasionalisme Menjelang Abad 21*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, 57-93.
- Juergensmayer, Marx. *Nasionalis Sekuler VS Nasionalis Religius*. Bandung: Mizan, 1998.
- Mitchell, Claire. "The Religious Content of Ethnic Identities". *Sociology*. Vol. 40, Nomor 6, Tahun 2006, 1135-1152.
- Nurhadi, Rofiq. "Pendidikan Nasionalisme Agamis dalam Pandangan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari". *Jurnal Studi Islam Cakrawala*. Vol. XXII, Nomor 2 Tahun 2017, 121-131.
- Patawari. *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*. Makasar: Unhas, Press, 2017.

- Purwastuti, L. Andriani. "Pendidikan Politik Nasionalis-Religius: Suatu Strategi Memperkokoh Kebhinekatunggalikaan Indonesia". *Fondasia*. Vol. II, Nomor 10, Tahun 2010, 28-42.
- Rohayuningsih, Heri. "Peranan BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia". *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 36, No. 2, 2009, 184-194.
- Sekulic, Dusko. Garth M. dan Randy H. "Ethnic Intolerance and Ethnic Conflict in the Dissolution of Yugoslavia". *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 29, Nomor 5, Tahun 2006, 797-827.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Silaban, Winner. "Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme". *Jurnal Dinamika Politik*. Vol. I, Nomor 3. Tahun 2012. 1-6.
- Smith, Anthony D. "The 'Sacred' Dimension of Nationalism". *Millenium - Journal of International Studies*. Vol. 29, Tahun 2000. 791-814.
- Veer, Peter van der. "Nationalism and Religion", John Breuilly (Ed.) *The Oxford Handbook of the History of Nationalism*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Voicu, Malina. "Effect of Nationalism on Religiosity in 30 European Countries". *European Sociological Review*. Vol. 28, Nomor 3, Tahun 2012. 333-343.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. "The Democratic Instinct in the 21st Century", *Journal of Democracy*. Vol. 21, Nomor 3, Tahun 2010. 5-10.
- Zaini, Naya Amin." Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia)". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 1 No. 2, Tahun 2016. 1-16.

SCOPE 7
WALISONGO AS A MODEL
OF SUCCESSFUL DA'WA